

HASIL PENELITIAN

**KAJIAN KETERSEDIAAN SARANA SOSIAL EKONOMI
PERKOTAAN DALAM MENUNJANG PENGEMBANGAN
IBU KOTA KABUPATEN KOLAKA UTARA**

Oleh :

S A M S I R

P1300 205 008



**PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MANAJEMEN PERKOTAAN**

**UNIVERSITAS HASANUDDIN
2010**

TESIS

**KAJIAN KETERSEDIAAN SARANA SOSIAL EKONOMI
PERKOTAAN DALAM MENUJANG PENGEMBANGAN
IBUKOTA KABUPATEN KOLAKA UTARA**

Disusun dan diajukan oleh

S A M S I R

Nomor Pokok P1300.205.008

Telah dipertahankan di depan Panitia Ujian Tesis

Pada tanggal 19 Nopember 2008

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Menyetujui

Komisi Penasihat,

Dr. Ir. Ria Wikantari, M.Arch.
Selitung, M.Sc.
Ketua

Prof. Dr. Ir. Mary
Anggota

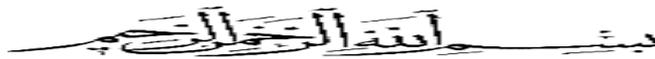
Ketua Program Studi
Pascasarjana
Manajemen Perkotaan,

Direktur Program
Universitas Hasanuddin,

Prof. Ir. Bambang Heryanto, M.Sc. Ph.D
Thaha, M.Sc.

Prof. Dr. dr. A. Razak

PRAKATA



Puji dan syukur Penulis panjatkan kepada Allah SWT. atas berkat dan karunia-Nya sehingga dapat menyelesaikan penulisan Tesis dengan judul **Kajian Ketersediaan Sarana Perkotaan Dalam Menunjang Pengembangan Ibu Kota Kabupaten Kolaka Utara**, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin Makassar Program Studi Manajemen Perkotaan.

Pada kesempatan ini sekiranya penulis berkesempatan untuk mengucapkan terima kasih kepada :

1. Ibu Dr. Ir. Ria Wikantari M.Arch. selaku pembimbing I, Ibu Prof. Dr. Ir. Mary Selintung, M.Sc. selaku pembimbing II yang telah memberi arahan dan bimbingan sehingga selesainya penyusunan Tesis ini.
2. Bapak dan Ibu Staf pengajar Program Studi Manajemen Perkotaan serta karyawan (i) Pascasarjana Universitas Hasanuddin, atas segala bimbingan, didikan dan bantuannya selama penulis menuntut ilmu di bangku perkuliahan.
3. Pihak instansi pemerintah Kabupaten Kolaka Utara yang telah memberikan bantuan selama proses penyusunan Tesis ini.
4. Rekan-rekan Mahasiswa (The Geng MAP 05) Program Studi Manajemen Perkotaan Angkatan 2005 Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin Dan teman-teman HIPPERMAKU Kolaka Utara yang telah banyak membantu dan kerjasamanya. Kompak selalu sobatku.

Secara khusus penulis ucapkan terima kasih yang tulus dan sedalam-dalamnya kepada Ayah dan Ibu, Saudara-saudaraku dan Fadilku yang

senantiasa mendoakan dan memberikan segalanya. Untukmu yang selalu menemaniku Shmilyku, thanks for you are my inspiration. Kepada semua pihak yang telah membantu dan tidak sempat penulis sebutkan, terima kasih atas bantuan yang telah diberikan. Semoga Allah SWT memberikan balasan atas segalanya.

Makassar, September 2010

Penulis

ABSTRAK

SAMSIR, *Kajian Ketersediaan Sarana Sosial Ekonomi Perkotaan Dalam Menujang Pengembangan Ibukota Kabupaten Kolaka Utara* (dibimbing oleh **Ria Wikantari** dan **Mary Selintung**).

Penelitian ini bertujuan untuk menidentifikasi ketersediaan sarana sosial ekonomi perkotaan yang ada saat ini dalam mendukung pengembangan Ibukota Kabupaten Kolaka Utara hingga 20 tahun mendatang serta merumuskan strategi yang dapat ditempuh oleh pemerintah Kabupaten Kolaka Utara dalam mewujudkan alokasi ketersediaan sarana sosial ekonomi perkotaan.

Penelitian ini menggunakan metode survey langsung kelapangan guna memperoleh data-data yang terkait dengan ketersediaan sarana sosial ekonomi perkotaan yang diuraikan secara deskriptif kuantitati maupun kualitatif.

Ditinjau dari aspek penduduk pendukung ketersediaan sarana sosial ekonomi perkotaan di kecamatan Lasusua belum mendukung kebutuhan pengembangan Ibukota kabupaten Kolaka Utara hingga 20 tahun mendatang diakibatkan oleh berbagai permasalahan perkotaan yang komplit dimana pada dasarnya penyediaan pengelolaan sarana dan prasarana perkotaan merupakan tanggung jawab pemerintah sebagai mana tercantum di dalam peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1987, tentang penyerahan prasarana lingkungan, utilitas umum dan fasilitas sosial harus diserahkan dan dikuasai oleh pemerintah

Strategi yang dapat ditempuh oleh pemerintah Kabupaten Kolaka Utara khususnya Kecamatan Lasusua, berupa melibatkan semua lapisan masyarakat dalam upaya swakelola pembangunan sarana peribadatan, pendidikan, kesehatan dan lain - lain yang didukung secara Finansial oleh pemerintah kabupaten. Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara juga perlu untuk mengambil inisiatif dalam menentukan pusat pengembangan wilayah yang baru dengan fasilitas yang memadai untuk mendukung akselerasi pembangunan kabupaten serta konsep penyebaran titik-titik pertumbuhan baru dengan melakukan pemerataan pembangunan dengan mengembangkan konsep kawasan cepat tumbuh dan kawasan andalan kabupaten maupun pengembangan kawasan sentra produksi.

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN

KATA PENGANTAR.....

i

DAFTAR ISI.....

ii

DAFTAR TABEL

vii

DAFTAR GAMBAR.....

.....ix

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	Belakang
.....	1
B. Rumusan Masalah
.....	5
C. Tujuan Penelitian
.....	6
D. Kegunaan Penelitian
.....	6
E. Ruang Lingkup Penelitian
.....	7
F. Sistematika Pembahasan
.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Sarana Perkotaan
.....	9
B. Sarana Perkotaan Menunjang Fungsi Kota
.....	11
C. Tujuan Pengembangan Kota dan Fungsi Utama Kota
.....	13
1. Tempat Tinggal (Wisma)
17	
2. Tempat Kerja (Karya)
18	

3. Fungsi Lalu Lintas (Marga).....
18
4. Fungsi Rekreasi (Suka).....
19

D. Penentuan Lokasi Kegiatan Di Daerah Perkotaan 19

1. Lokasi Tempat Tinggal.....
20
2. Lokasi Perkantoran
20
3. Lokasi Industri.....
21
4. Lokasi Perdagangan
22

E. Penentuan Kebutuhan Sarana Sosial Ekonomi

di Kawasan Permukiman

.....
..... 23

F. Standar Perencanaan Sarana Sosial Ekonomi Berdasarkan

Petunjuk Perencanaan Kawasan Perumahan

Kota Departemen Pekerjaan Umum Tahun

1987..... 24

1. Sarana Pendidikan
24
2. Sarana Kesehatan
27
3. Sarana Perdagangan
28
4. Sarana Peribadatan
29
5. Sarana Pemerintahan
30
6. Sarana Olah Raga dan Rekreasi
30

G. Penelitian	Terkait
.....	
.....	32
H. Kerangka	Pikir
.....	35

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	36
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	36
C. Jenis dan Sumber Data	36
D. Teknik Pengumpulan Data	38
E. Teknik Analisa Data	38
F. Defenisi Operasional	43
G. Variabel Penelitian	44

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A.	G
ambaran Umum Kab. Kolaka Utara	45
1. Letak Geografis dan Administrasi.....	45
2. Kependudukan.....	47
a)	L
aju Pertumbuhan Penduduk.....	47
b)	J
umlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin.....	48

B.	G
ambaran Umum Kota Lasusua.....	49
1. Aspek Fisik Dasar Kota Lasusua.....	49
a) Letak Geografis.....	49
b) Topografi dan Kelerengan.....	50
c) Geografi dan Jenis Tanah.....	51
d) Hidrologi.....	51
e) Penggunaan Lahan.....	56
2. Kependudukan.....	58
a. Perkembangan Jumlah Penduduk.....	58
b. Distribusi dan Tingkat Kepadatan Penduduk.....	59
c. Struktur Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian...	60
3. Sarana Perkotaan.....	61
a. Sarana Sosial Ekonomi.....	
61	
1) Sarana Pemerintahan.....	61
2) Sarana Perdagangan.....	62
3) Sarana Peribadatan.....	63
4) Sarana Pendidikan.....	63
5) Sarana Kesehatan.....	64
6) Sarana Olahraga.....	65
C.	A
nalisis Fisik Dasar.....	66
1. Kondisi Geomorfologi.....	72
2. Kondisi Fisiografi dan Topografi Wilayah.....	73
a. Kondisi Kemiringan Lahan/Kelerengan (Slope).....	73
b. Klimatologi.....	74
c. Hidrologi dan Oceanografi.....	75
3. Kondisi Geologi.....	79
a. Satuan Geologi.....	79
b. Struktur Geologi.....	80

4. Kondisi Tanah.....	81
D.	A
Analisis Kependudukan.....	82
a. Laju dan Pertumbuhan Penduduk.....	82
b. Karakteristik Sosial Budaya dan Dinamika Sosial Masyarakat.84	
1) Masyarakat Terbuka.....	85
2) Masyarakat Transisi.....	85
3) Masyarakat Tradisional.....	85
E.	K
kebutuhan Ruang Fasilitas Sosial Ekonomi Perkotaan...	87
1. Fasilitas Pendidikan.....	87
a. Sarana Pendidikan TK.....	88
b. Sarana Pendidikan SD.....	88
c. Sarana Pendidikan SLTP.....	89
d. Sarana Pendidikan SLTA.....	90
2. Fasilitas Kesehatan.....	90
3. Fasilitas Peribadatan.....	92
4. Fasilitas Perdagangan.....	93
5. Sarana Olahraga.....	95
F.	A
Analisis SWOT Pemenuhan Kebutuhan Sarana Sosial Ekonomi Perkotaan Di Kecamatan Lasusua.....	98
1.	F
aktor Internal.....	99
a. Kekuatan (Strengths).....	99
b. Kelemahan (Weaknesses).....	
100	
2.	F
aktor Eksternal.....	

100			
3.	eluang	(Opportunities).....	P
100			
4.	ncaman	(Thereats).....	A
101	•	trategi dan Implementasi.....	S
104			

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....

107

B. Saran.....

109

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Kebutuhan Sarana Pendidikan Berdasrkan Penduduk Pendukung	26
Tabel 2 : Standar Kebutuhan Sarana Kesehatan Berdasarkan Penduduk Pendukung	27
Tabel 3 : Kebutuhan Sarana Perdagangan Berdasarkan Penduduk Pendukung	29
Tabel 4 : Kerangka Pikir.....	35
Tabel 5 : SWOT.....	44
2	
Tabel 6 : Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2002 - 2006.....	48
Tabel 7 : Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Kabupaten Kolaka Utara, Tahun 2006.....	49
Tabel 8 : Topografi dan Kemiringan Lereng di Kota Lasusua.....	50
Tabel 9 : Pola Penggunaan Lahan di Kota Lasusua Tahun 2006.....	56
Tabel 10 : Jumlah dan Perkembangan Penduduk di Kota Lasusua Tahun 2002-2006.....	59
Tabel 11 : Luas Wilayah, Penduduk dan Kepadatannya dirinci Per Kelurahan, Tahun 2006.....	60
Tabel 12 : Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian di Kota Lasusua, Tahun 2006.....	61
Tabel 13 : Jenis Sarana Perdagangan dan Jasa di Kota Lasusua, Tahun 2006.....	62
Tabel 14 : Jumlah Sarana Peribadatan di Kota Lasusua, Tahun 2006.....	63
Tabel 15 : Jumlah dan Jenis Sarana Pendidikan di Kota Lasusua, Tahun 2006.....	64
Tabel 16 : Jumlah Sarana Kesehatan di Kota Lasusua Tahun 2007.....	65
Tabel 17 : Kemiringan Lahan di Kabupaten Kolaka Utara.....	74

Tabel 18 : Sebaran Sungai Di Kabupaten Kolaka Utara.....	76
Tabel 19 : Jenis Tanah Dan Luasannya Di Kabupaten Kolaka Utara.....	81
Tabel 20 : Proyeksi Jumlah Penduduk di Ke Lasusua Tahun 2006-2026.....	84
Tabel 21 : Rekapitulasi Kebutuhan Ruang untuk Semua Jenis Sarana di Kecamatan Lasusua Tahun 2026.....	97
Tabel 22 : 4.5 Matriks (SWOT) Keterkaitan faktor Internal dan faktor Eksternal.....	10

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 : Kerangka Pikir.....	35
Gambar 2 : Peta Administrasi Kecamatan Lasusua.....	48
Gambar 3 : Peta Distribusi Kepadatan Penduduk.....	54
Gambar 4 : Peta Eksisting Penyebaran Fasilitas	60
Gambar 5 : Peta Analisis Sebaran Penduduk.....	76
Gambar 6 : Peta Pemenuhan Pemenuhan Fasilitas Kesehatan	93
Gambar 7 : Peta Pemenuhan Pemenuhan Fasilitas Pendidikan	94
Gambar 8 : Peta Pemenuhan Pemenuhan Fasilitas Perdagangan.....	95
Gambar 10 : Pemenuhan Pemenuhan Fasilitas Peribadatan dan Fasiliutas Lainnya	96

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada umumnya kota di Indonesia adalah merupakan perkembangan dari suatu desa. Didalam suatu kota dimungkinkan untuk

adanya suatu lingkungan yang beranekaragam kegiatan dengan berbagai aktivitas kota serta sarana dan prasarana yang mendukungnya.

Kota adalah pusat dari kegiatan ekonomi, pemerintahan, politik, dan sosial sehingga perkembangan disegala bidang seperti pembangunan sarana dan prasarana kota, yaitu bangunan-bangunan yang mempunyai fungsi-fungsi tertentu dan juga pembangunan manusianya yang tinggal dikota.

Penduduk yang bekerja pada daerah perkotaan memiliki klasifikasi berdasarkan aktivitas pekerjaannya masing-masing, dimana mata pencaharian penduduk didominasi oleh kegiatan non pertanian, sebagian besar merupakan kegiatan sektor jasa atau sektor tersier (perdagangan, transportasi, keuangan, perbankan, pendidikan, kesehatan dan jasa lainnya), sektor pengolahan atau sektor sekunder (industri dan manufaktur), serta pola hubungan lainnya antar individu dalam masyarakat dapat dikatakan lebih bersifat rasional, ekonomis dan individualistis. Koestoer, Dkk. (2001:31).

Perkembangan jumlah penduduk pada daerah perkotaan yang disertai dengan peningkatan arus urbanisasi membawa perubahan besar pada kebutuhan dasar manusia yaitu kebutuhan akan papan beserta fasilitas penunjangnya. Kebutuhan dasar tersebut terus meningkat secara alamiah seiring kompleksitasnya kebutuhan hidup bermasyarakat, seperti kebutuhan untuk aktivitas sosial, aktivitas ekonomi, dan aktivitas pelayanan umum. Dari fenomena tersebut menuntut pula pembangunan

sarana dan prasarana di daerah perkotaan sebagai pengejawantahan menjaga kelangsungan hidup masyarakat di daerah perkotaan dalam rangka menuju kota berkelanjutan (*sustainable cities*).

Menurut Jayadinata, (1999:31) bahwa dalam meningkatkan perkembangan kegiatan sosial dan ekonomi, sarana dan prasarana merupakan hal yang penting. Pembangunan tidak dapat berjalan dengan lancar jika sarana dan prasarana tidak baik. Jadi prasarana dapat dianggap sebagai faktor potensial dalam menentukan masa depan dari perkembangan suatu wilayah perkotaan dan perdesaan. Untuk itu perhatian sejak dini dalam hal pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana merupakan suatu hal yang tidak bisa ditawar lagi pembangunannya baik dari segi pembangunan kuantitas sarana dan prasarana yang ada maupun kualitas pelayanannya.

Dalam menunjang aktifitas penduduk di daerah perkotaan tersebut, maka ketersediaan sarana dan prasarana merupakan salah satu indikator utama dalam mendukung aktifitas dari kota itu sendiri, selain itu juga ketersediaan dari sarana dan prasarana tersebut juga dapat mendukung aktifitas penduduk yang akan melakukan aktifitasnya baik itu di bidang sosial maupun di bidang ekonomi. Upaya ini dilakukan agar tercapai kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan peluang-peluang dan sumber daya yang ada secara optimal, efisien, sinergis, dan *sustainable* dengan cara menggerakkan kegiatan-kegiatan ekonomi, penciptaan iklim kondusif, dengan penyediaan sarana-prasarananya, tanpa mengabaikan

perlindungan terhadap lingkungan. Di samping itu, pendekatan ini memungkinkan pengembangan suatu sektor tertentu sebagai *leading sector* (unggulan/prioritas) di suatu wilayah dengan didukung sektor-sektor lainnya secara sinergis sehingga tercapai manfaat yang optimal.

Menurut Jayadinata, (1999:154) Perkembangan fisik kota sebaiknya diarahkan ke lahan yang tidak potensial lagi, hal ini dilakukan untuk mencapai efisiensi pembangunan dan menjaga keseimbangan ekosistem lingkungan fisik suatu perkotaan, serta untuk meningkatkan pemanfaatan, lahan mutu, dan penggunaan lahan untuk kepentingan penempatan suatu atau beberapa kegiatan fungsional sehingga dapat memnuhi kebutuhan dan kegiatan usaha secara optimal ditinjau dari segi sosial, ekonomi, sosial budaya, fisik dan secara hukum.

Dalam UU No. 26 Tahun 2007 serta PP No. 25 Tahun 2000 disebutkan bahwa pengembangan dan pengelolaan prasarana dan sarana perkotaan merupakan tanggung jawab pemerintah otonom. Dengan demikian, pemerintah pusat memiliki pergeseran kepentingan sehingga diharapkan dapat memfasilitasi kebijakan pengembangan nasional. Meskipun begitu, kebutuhan untuk kebijakan pengembangan masih juga diperlukan mengingat antara satu daerah dan daerah lainnya tetap harus saling belajar dan mengembangkan diri secara bersama-sama.

Kolaka Utara merupakan kabupaten termuda di Provinsi Sulawesi Tenggara yang merupakan wilayah pemakaran dari Kabupaten

Kolaka terletak ujung utara dan berbatasan langsung dengan wilayah daratan Provinsi Sulawesi Selatan, dengan memiliki luas wilayah keseluruhan yaitu $\pm 15.767,67 \text{ km}^2$ yang terdiri dari 13 kecamatan.

Ibukota Kolaka Utara memiliki peranan dalam memberikan pelayanan dan penyediaan sarana perkotaan bagi pemenuhan kebutuhan masyarakat kota itu sendiri. Bagi Ibukota Kolaka Utara, penentuan pusat-pusat kegiatan dan fungsinya didasarkan pada hal-hal yang mencakup peningkatan intensitas pembangunan bagi fungsi yang telah ada saat ini dan telah berkembang, utamanya untuk mengantisipasi perkembangan kota di masa datang, terlebih lagi dalam rangka mengefektifkan fungsi-fungsi kota yang cenderung berkembang dengan tidak teratur. Selain itu fasilitas sarana perkotaan nantinya diharapkan dapat berdaya dan berhasil guna dalam pencapaian sasaran yang diharapkan. Hal ini dapat terjadi disebabkan berkembangnya jumlah penduduk yang semakin mengarah ke wilayah kota hingga dapat dipastikan akan mempengaruhi tuntutan masyarakat dalam peningkatan kebutuhan pelayanan.

Kenyataan menunjukkan bahwa di Ibukota Kolaka Utara khususnya mengenai ketersediaan sarana perkotaan berupa sarana pendidikan, kesehatan, peribadatan, perdagangan, perkantoran, pemakamam serta sarana olahraga dan rekreasi, saat ini masih sangat terbatas, hal ini dapat dilihat dari masih banyaknya sarana perkotaan khususnya untuk

perkantoran yang masih menempati dan menggunakan fasilitas perumahan penduduk sebagai sarana perkantoran itu sendiri, serta terjadinya penggabungan antara dinas yang satu dengan dinas-dinas yang lain dalam satu bangunan. Disisi lain keberadaan fasilitas pemerintahan daerah sebagai pusat pemerintahan Kolaka Utara saat ini masih menempati ruang Kantor Kecamatan, sedangkan untuk Kantor Kecamatan masih memanfaatkan perumahan penduduk.

Berangkat dari hal tersebut diatas, maka untuk mengantisipasi perkembangan Ibukota Kolaka Utara khususnya ketersediaan sarana perkotaan untuk tahun mendatang, maka diperlukan suatu kajian penelitian tentang sarana perkotaan yang hasilnya diharapkan dapat memberikan gambaran untuk pengembangan Ibukota Kolaka Utara itu sendiri.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan tersebut diatas, maka peneliti dapat merumuskan permasalahan yang terjadi di lokasi penelitian yaitu :

1. Bagaimana ketersediaan sarana sosial ekonomi perkotaan yang ada saat ini dalam mendukung kebutuhan pengembangan Ibukota Kolaka Utara hingga 20 tahun mendatang.
2. Bagaimana strategi yang ditempuh oleh pemerintah daerah dalam upaya memenuhi ketersediaan sarana sosial ekonomi perkotaan.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah yang dikemukakan tersebut maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengidentifikasi ketersediaan sarana sosial ekonomi perkotaan yang ada saat ini dalam mendukung pengembangan Ibukota Kabupaten Kolaka Utara.
2. Untuk merumuskan strategi yang dapat ditempuh dalam mewujudkan alokasi ketersediaan sarana sosial ekonomi perkotaan.

D. Kegunaan Penelitian

Sedangkan kegunaan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- Penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan bagi pemerintah Kabupaten Kolaka Utara dalam pembangunan/ pengembangan kota.
- Memberikan gambaran terhadap kebutuhan sarana perkotaan 20 tahun akan datang seiring dengan perkembangan penduduk Ibukota Kabupaten Kolaka Utara (Kecamatan Lasusua)
- Sebagai bahan kajian dan informasi bagi calon peneliti selanjutnya terutama peneliti masalah sarana perkotaan Ibukota Kabupaten pemekaran.

E. Lingkup Penelitian

Lingkup pembahasan dalam penelitian ini, meliputi wilayah Kecamatan Lasusua sebagai Ibukota Kabupaten Kolaka Utara dalam hal ini di fokuskan pada desa dan kelurahan meliputi Kelurahan Lasusua, Desa Sulaho, Desa Totallang, Desa Pitulua, Desa Rantelimbong, Desa Tojabi, Desa Watuliu, Desa Ponggiha, Desa Ujung Tobaku, Desa Katoj, Desa Simbula, Desa Maruge dan Desa Lanipa-nipa.

F. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan, yang berisikan tentang latar belakang, rumusan masalah, maksud dan kegunaan penelitian, ruang lingkup penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II Tinjauan Pustaka, menjelaskan tentang teori-teori yang terkait masalah sarana perkotaan, yaitu diantaranya sarana perkotaan, sarana perkotaan menunjang fungsi kota, tujuan pengembangan kota dan fungsi utama kota, penentuan lokasi kegiatan di daerah perkotaan, penentuan kebutuhan sarana di kawasan permukiman serta penyediaan sarana dan prasarana permukiman, standar perencanaan sarana sosial ekonomi berdasarkan petunjuk perencanaan kawasan perumahan kota

depatemen pekerjaan umum tahun 1987, penelitian yang Terkait dan kerangka pikir.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Sarana Perkotaan

Pengertian sarana dalam kamus tata ruang yang bersifat umum dipakai untuk menunjuk kepada suatu unsur penting dalam aset pemerintah atau pemberian jasa pelayanan pada umumnya; jaringan dan/atau bangunan-bangunan yang memberikan pelayanan dengan fungsi tertentu kepada masyarakat maupun perorangan berupa kemudahan kehidupan masyarakat dan pemerintah; menunjang kebutuhan masyarakat; diperkotaan lebih kompleks (rumit) dan diluar kota lebih langka; misalnya bangunan-bangunan kesehatan, sosial, peribadatan, pendidikan, dan pemerintahan.

Menurut Jayadinata (1999:31) sarana adalah alat pembantu dalam prasarana. Sarana umumnya merupakan bangunan-bangunan maupun sebidang tanah yang mana berfungsi langsung dalam memberikan jasa atau dampak langsung terhadap aktivitas sosial atau ekonomi kepada masyarakat. Adapun yang dimaksud dengan sarana menurut Koestoer (1997:36) yaitu fasilitas sosial yang terdiri dari bangunan-bangunan dan lapangan terbuka yang dibutuhkan oleh masyarakat, meliputi fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, fasilitas perbelanjaan-niaga, fasilitas pemerintahan-pelayanan umum, fasilitas

peribadatan, fasilitas rekreasi-kebudayaan, fasilitas olah raga dan lapangan terbuka.

Dari beberapa pengertian sarana tersebut di atas, sarana merupakan wadah yang berfungsi memberikan pelayanan sosial dan ekonomi bagi masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup secara layak. Untuk itu pembangunan sarana kaitannya dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat harus mempertimbangkan proporsi yang efektif antara jumlah populasi pendukung dengan kuantitas sarana yang ada, dapat terjangkau (aksesibilitas), kualitas pelayanan, karakteristik sosial dan ekonomi masyarakat, serta pelibatan secara holistik komponen perencanaan.

Kelengkapan sarana dan prasarana permukiman di Indonesia diatur dalam peraturan Menteri Pekerja Umum Nomor 07/KPS/1986 tentang Pedoman Pembangunan Rumah Sederhana Tidak Bersusun, secara garis besar, kelengkapan sarana dan prasarana tersebut didasarkan kepada jumlah penduduk minimum. Asumsi yang digunakan antara lain bahwa lingkungan permukiman terkecil terdiri atas 50 unit rumah (KK) dengan luas lahan 1 hektar, setiap KK beranggotakan 5 orang.

Pada dasarnya penyediaan pengelolaan sarana dan prasarana diatas merupakan tanggung jawab pemerintah sebagai mana tercantum di dalam peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1987, tentang penyerahan prasarana lingkungan, utilitas umum

dan fasilitas sosial harus diserahkan dan dikuasai oleh pemerintah antara lain :

1. Prasarana lingkungan, meliputi jalan, jembatan, tempat parkir, saluran pembuangan air limbah dan hujan.
2. Utilitas umum, yang meliputi terminal angkutan, fasilitas/fasilitas kebersihan/pembuangan sampah.
3. Sarana Perkotaan, yang meliputi fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, fasilitas perkantoran, fasilitas peribadatan, fasilitas perdagangan, fasilitas industri, pemakaman dan fasilitas olahraga & rekreasi.

B. Sarana Perkotaan Menunjang Fungsi Kota

Sarana Perkotaan merupakan bagian dari suatu sistem pembangunan perkotaan yang harus dipertimbangkan dalam upaya meningkatkan produktifitas kota serta memelihara sustainabilitas kota dimana proses ini menjadi tanggung jawab Departemen Pekerjaan Umum. Dalam proses tersebut dilakukan penyusunan rencana tata ruang yang strategis yang nantinya menjadi pedoman mengenai bentuk dan fungsi kota di masa depan, selanjutnya dilakukan penentuan kebutuhan pelayanan kota untuk seluruh penduduk perkotaan, adapun penempatan lokasi kebutuhan prasarana dan sarana tersebut ditentukan oleh bentuk dan fungsi kota.

Kota ditinjau secara fisik juga berisikan *struktur* atau bangunan yang lain yang bukan berupa bangunan gedung, yaitu : jembatan, gorong-

gorong, saluran irigasi dan pengendali banjir, jaringan utilitas umum, gardu-gardu listrik, fasilitas pengolahan limbah, bak-bak penampungan, penggilingan minyak, dan berbagai instalasi lain yang tidak lazim disebut sebagai bangunan, karena struktur atau bangunan tidak sebagaimana bangunan umumnya dalam hal menutupi tanah yang ada di bawahnya. Struktur-struktur yang bukan berupa bangunan juga memiliki fungsi yang penting bagi sebuah kota, sebagaimana pentingnya bangunan gedung.

Seperti telah terjadi pada banyak negara berkembang yang lain, pada tahun 1970-an Indonesia telah mengalami penambahan penduduk perkotaan yang pesat. Bersamaan dengan itu, meningkat pula tingkat pelayanan perkotaan yang diharapkan mampu melayani kebutuhan masyarakat, pemerintah telah menetapkan untuk menyalurkan sebagian pendapatan tersebut untuk mengejar ketinggalan dalam penyediaan prasarana dan sarana perkotaan, meskipun pendekatan ini dapat dengan cepat meningkatkan penyediaan prasarana dan sarana kota. Pertumbuhan penduduk yang pesat di daerah perkotaan di Indonesia dalam dasawarsa terakhir, telah diikuti dengan serangkaian program investasi perkotaan.

Suatu kegiatan perencanaan penggunaan tanah dilaksanakan oleh komisi perencanaan kota beserta staf, dimana rencana-rencana yang disusun oleh *departemen pelaksana* dikelompokkan ke dalam setiap sistem prasarana dan sarana kota atau sistem pelayanan. Secara terpisah maupun bersama-sama, sistem prasarana dan sarana pelayanan tersebut

berpengaruh sangat besar pada bentuk keruangan, karakter fisik, dan kondisi sosio-ekonomi kota. Dengan pengertian yang berbeda maupun pengertian yang lain, departemen dan dinas-dinas pelaksana merencanakan kota sesuai dengan tanggung jawab masing-masing, yaitu berkaitan dengan penyediaan sistem pelayanan. Di dalam melaksanakan tugas tersebut, departemen dan dinas-dinas pelaksana menentukan bentuk kota dan masa depannya dengan menggunakan sebanyak mungkin cara sesuai dengan kegiatan masing-masing yang harus dilaksanakan. Sebuah model fisik bagi sebuah kota baru dapat dibuat untuk menunjukkan secara sepintas lalu keadaan eksisting (yang ada saat ini) dan yang diusulkan, sistem prasarana fisik, dan unsur-unsur lingkungan lainnya.

Dari penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa sarana dalam menunjang fungsi kota merupakan salah satu indikator sangat berpengaruh, ini dapat dilihat dari suatu kota yang telah dilengkapi dengan ketersediaan sarana, maka kota tersebut dapat memenuhi atau menunjang aktivitas dari penduduk kotanya.

2.1. Tujuan Pengembangan Kota dan Fungsi Utama Kota

Tujuan pengembangan kota adalah pembangunan kota itu sendiri dalam arti bahwa kondisi kota menjadi lebih baik disegala sektor yang meliputi sektor jasa, industri dan pertanian (paling tidak pengelolaan hasil pertanian) dan di segi penerimaan masyarakat atau di segi pengeluaran

konsumsi, investasi dan pemerintah daerah serta ekspor impornya (*net export*). Selanjutnya diharapkan agar kegiatan perekonomian kota itu membuka kesempatan kerja lebih banyak, sehingga tercapailah pemerataan di segala bidang dalam kehidupan kota. Disamping tujuan diatas ada tujuan lain dari pengembangan kota, yaitu agar kegiatan kota dan daerah sekitarnya itu seimbang. Dengan perkataan lain kota hendaknya berkembang dalam fungsinya sebagai tempat pelayanan warga kota dan daerah sekitarnya.

Untuk pencapaian tujuan-tujuan tersebut tentu saja perlu diadakan evaluasi tentang kekuatan serta kelemahan kota, baik itu sektor swasta maupun pemerintah dalam segi-segi atau aspek lahan, lokasi, kesempatan kerja, permukiman, angkutan kota, keuangan dan lain-lain. Hal-hal yang positif kiranya akan dapat membantu memperlancar tercapainya tujuan-tujuan, karena orang tinggal memusatkan perhatian pada kegiatan-kegiatan untuk memperbaiki hal-hal yang kurang atau negatif terlebih dahulu.

Dengan melihat pada keadaan dan situasi *lingkungan*, baik itu intern maupun ekstern kota, dapatlah ditentukan posisi kota. Yang dimaksud lingkungan disini ialah situasi politik, ekonomi, sosial, budaya, agama, teknologi, pertahanan dan keamanan di dalam kota maupun daerah di luar kota baik sekarang maupun yang akan datang. Dengan demikian dapatlah ditentukan seberapa besar celah/kesenjangan/"gap"

yang perlu diisi dengan tindakan-tindakan positif, yaitu paling tidak mendekati situasi sekarang dengan tujuan yang ingin dicapai.

Dalam pedoman perencanaan lingkungan permukiman kota yang disusun oleh Direktorat Tata Kota dan Tata Daerah Direktorat Penyelidikan Masalah Bangunan (1979 : 1-5) dinyatakan unsur ruang suatu kota yang pada hakekatnya akan mempunyai fungsi primer dan sekunder adalah terdiri dari unsur ruang pokok dan unsur ruang penunjang. Dimana pada kawasan primer akan terkait pada kepentingan sebagai simpul jasa dan distribusi, sedangkan ruang penunjang berupa sarana dan prasarana pendukung berbagai lingkungan yang diperlukan dalam peranannya sebagai fungsi primer.

Pada hakekatnya, sebelum terjadi revolusi industri yang mendorong perkembangan kota agar dapat meningkatkan konsepsi lingkungan tempat kediaman, yang lebih dikenal dengan konsep Garden City-nya Ebenezer Howard, pada zaman Neolithic dan zaman Romawi kuno, konsep lingkungan tempat kediaman sebenarnya sudah mengalami kemajuan dengan mengikuti konsep-konsep yang lebih sistematis dan mempunyai nilai-nilai budaya yang bermutu. Pada zaman ini kekuasaan raja sudah mulai ada sehingga kota direncanakan untuk difungsikan sebagai tempat pemujaan kepada raja/ penguasa. Selain itu penguasa juga berfungsi sebagai pemuka agama sehingga menyebabkan fungsi kota juga sebagai tempat pemujaan berhalal.

Fungsi dasar suatu kota adalah untuk menghasilkan penghasilan yang cukup melalui produk barang dan jasa, guna mendukung kehidupan penduduknya dan untuk kelangsungan kota itu sendiri. Branch (1995 : 71). Sedangkan menurut Sinulingga (1999 : 51-52) sebuah kota berfungsi sebagai pusat pengembangan (Growth Center) dari wilayah pengaruhnya (*hinterland*).

Fungsi suatu kota tergantung pada suatu ukuran, oleh karena itu fungsi kota menurut Daxiadis terbagi dalam 2 (dua) kelas atau rank (tingkatan). Kelas A terdiri dari settlement (pemukiman), village (kampung), hamlet (dusun/ desa), town (kota), dan city (kota besar). Sedang fungsi kota yang termasuk kelas B adalah merupakan penggabungan fungsi-fungsi kota yang terdapat di kelas A, sehingga pada kelas B fungsi kotanya merupakan pusat utama. Pada dasarnya kota berfungsi sebagai tempat pelayanan, pemasaran, kegiatan industri, peribadatan, pendidikan, dan sebagainya.

Selain dari pada itu fungsi utama kota sebagai pusat pelayanan, juga merupakan pusat suatu wilayah, jadi suatu kota dapat berfungsi sebagai penyelenggara dan penyedia jasa bagi sekitarnya, beberapa kota tertentu di Indonesia sudah menampakkan fungsi yang jelas, tetapi sebagian besar belum demikian.

Menurut Christaller, pusat-pusat pelayanan cenderung tersebar di dalam suatu wilayah menurut pola berbentuk heksagon (segi enam). Kondisi seperti ini akan nyata dengan jelas di wilayah yang mempunyai 2 syarat; (1) topografi yang seragam, sehingga tidak ada bagian wilayah yang mendapat pengaruh dari lereng dan pengaruh alam lain dalam hubungan dengan jalur angkutan, (2) kehidupan ekonomi yang homogen dan tidak menghasilkan padi-padian, kayu dan batu bara.

Bila kondisi suatu kota mempunyai kedua syarat seperti di atas maka akan menyebabkan berkembangnya tiga hal yaitu:

1. Ajang jasa (ajang niaga) akan berkembang secara wajar di seluruh wilayah.
2. Kawasan-kawasan berbentuk lingkaran yang saling berbatasan akan mempunyai bagian-bagian yang bertumpang tindih atau bagian yang senjang.
3. Dalam wilayah akan berkembang ajang niaga dalam pola heksagon.

Salah satu dusun akan tumbuh makin besar menjadi kampung, karena dusun itu mempunyai kegiatan tertentu. Karena perkembangan tersebut, maka dapat dikatakan bahwa kota-kota umumnya timbul sebagai akibat perkembangan potensi wilayah. Hal ini dikarenakan wilayah mempunyai surplus produksi pertanian sehingga terjadi spesialisasi mata pencaharian, sebagian penduduk tidak perlu bekerja sebagai petani tetapi dapat melakukan keahlian lain. Pada perkembangan selanjutnya kota-kota dapat tumbuh dikarenakan perdagangan, industri, pertambangan dan sebagainya.

Dalam kehidupan masyarakat perkotaan yang dinamis, maka sebuah kota harus mempunyai sekurang kurangnya 4 (empat) fungsi utama. Adisasmita (1999: 10-16), yaitu:

1. Tempat Tinggal (*Wisma*)

Perumahan (*papan*) merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia disamping kebutuhan makanan (*pangan*) dan kebutuhan pakaian (*sandang*).

Perumahan sangat penting pula artinya dalam meningkatkan stabilitas sosial, dinamika dan produktifitas kerja. Pertumbuhan penduduk kota yang sangat pesat akan meningkatkan kebutuhan terhadap perumahan yang semakin besar pula. Pemenuhan kebutuhan perumahan dalam kenyataanya banyak mengalami hambatan, disebabkan karena

rendahnya kemampuan ekonomi sebagian besar penduduk dan tingginya biaya pembangunan perumahan.

2. Tempat Kerja (*Karya*)

Kota sebagai pusat kegiatan dapat ditandai dengan terjadinya aglomerasi industri dan arus urbanisasi. Kegiatan tersebut meliputi kegiatan-kegiatan dibidang pemerintahan, perindustrian, perdagangan, perbankan, perhubungan, pendidikan, kesehatan, sosial budaya, keagamaan dan sebagainya. Kegiatan-kegiatan tersebut makin berkembang, baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif, untuk itu perlu diberikan perhatian dan pengelolaan yang wajar serta memadai, agar pertumbuhan dan perkembangan kota dapat berlangsung secara wajar.

3. Fungsi Lalu Lintas (*Marga*)

Permukiman penduduk yang terpusat di daerah perkotaan menimbulkan kebutuhan akan sarana dan prasarana transportasi yang digunakan untuk melayani angkutan penduduk. Secara teoritis permintaan akan jasa transportasi adalah bersifat turunan (*derived demand*).

Perencanaan umum dalam daerah perkotaan diharapkan dapat membantu pertumbuhan kota yang lebih baik dan lebih serasi. Lokasi kegiatan-kegiatan ekonomi akan dapat diatur dan disesuaikan dengan lokasi perumahan yang dihubungkan melalui jalur angkutan kota yang tepat.

4. Fungsi Rekreasi (*Suka*)

Prestasi kerja dipengaruhi oleh banyak faktor, misalnya tingkat pendidikan, pendapatan, kesehatan, perumahan, kebiasaan dan rekreasi. Dengan cukup tersedianya lokasi rekreasi diharapkan penduduk di daerah perkotaan dapat menyegarkann kembali keadaan jasmani dan rohaninya, serta menimbulkan semangat dan menambah gairah kerja, yang selanjutnya diharapkan produktifitas kerja dapat ditingkatkan.

Fasilitas rekreasi yang disediakan seyogyanya dapat memenuhi cita rasa dan keinginan penduduk kota secara luas, yang berarti dapat dinikmati oleh sebagian besar golongan umur yang mempunyai berbagai kegemaran.

C. Penentuan Lokasi Kegiatan Di Daerah Perkotaan

Menurut Adisasmita (1999: 40) analisa lokasi berbagai jenis kegiatan di kawasan perkotaan dan struktur spasial kota tidak dapat dilepaskan dari masalah pentingnya penghematan eksteren (*external economies*) dan penghematan aglomerasi (*agglomeration economies*) serta biaya transportasi.

Penghematan eksteren meliputi kemudahan untuk pasar tenaga kerja, manfaat yang diperoleh dari kontak pribadi dan penyediaan jasa perdagangan, kemudahan dalam hal potensi

penduduk dan pasar, faktor lingkungan dan pengaruh daerah sekitarnya, sedangkan penghematan aglomerasi meliputi skala ekonomi pada perusahaan atau tingkat industri.

1. Lokasi Tempat Tinggal

Pemilihan lokasi untuk perumahan sangat penting untuk diperhatikan, dimana daerah kota yang digunakan untuk perumahan merupakan bagian terbesar. Menurut Adisasmita (1999: 41-42) ada dua jenis model lokasi rumah tangga, yaitu :

- Faktor-faktor yang menjadi pertimbangan utama dalam penentuan suatu lokasi adalah biaya perjalanan ke tempat pekerjaan, hal ini berarti penentuan lokasi permukiman berpedoman pada minimalisasi biaya perjalanan atau lebih mengacu kepada faktor ekonomi.
- Pendekatan yang kedua terdiri dari teori-teori yang menekankan pemilihan lokasi rumah, pemilihan daerah dan pemilihan lingkungan sebagai penentu utama lokasi permukiman.

2. Lokasi Perkantoran

Lokasi perkantoran pada umumnya berada pada pusat kota. Suatu peningkatan besarnya kota diasosiasikan dalam suatu peningkatan yang lebih besar dalam tata ruang kantor. Hal ini

disebabkan karena kota besar melaksanakan sejumlah fungsi yang regional, nasional dan internasional, dan sebagian lagi karena sektor-sektor jasa pada umumnya serta lapangan kerja perkantoran pada khususnya berkembang pula. Lokasi pada pusat kota memberikan manfaat penghematan eksteren. Penghematan ini merupakan penghematan yang sangat penting bagi berbagai macam jenis kantor, profesi perbankan maupun asuransi.

3. Lokasi Industri

Lokasi kegiatan industri, diputuskan atau ditetapkan berdasarkan berbagai macam orientasi. Ada yang berorientasi energi, ada yang berorientasi kepada pasaran, ada yang kepada bahan mentah, ada pula yang berorientasi kepada kemajuan teknologi. Dasar orientasi keputusan tersebut terutama ditekankan kepada biaya transportasi yang rendah.

Mengenai lokasi industri ini, Weber dalam Sumaatmaja (1988: 129) membedakan antara biaya transportasi bahan mentah dari sumber bahan mentah ke lokasi produksi, dan biaya transportasi pemasaran komoditi dari tempat produksi ke tempat penjualan. Sedangkan (Apple, 1990: 522 ; Djojodipuro, 1992 : 31 ; Smith, 1970 : 45-46) mengatakan bahwa faktor-faktor penentu suatu lokasi industri antara lain ; (1) Lahan dan atributnya, (2) Kapital/modal, (3) Bahan mentah dan penguasaan pasar, (4) Tenaga kerja, (5) Pasar dan

harga, (6) Transportasi dan biaya angkutan, (7) Aglomerasi dan ekonomi eksternal, (8) Kebijakan dan perencanaan, (9) Kontak personal.

4. Lokasi Perdagangan

Besar dan macam fasilitas pertokoan pada suatu lokasi tertentu merupakan daya tarik yang penting. Aglomerasi "*shopping centre*" adalah lebih efisien karena biaya perjalanan dan waktu bagi para pembeli dan langganan dapat diminimalkan. Sedangkan toko yang menjual barang-barang kebutuhan sehari-hari memilih lokasinya mendekati pembeli langganannya. Ada gejala bahwa suatu toko yang ada sekarang pindah dari pusat kota dan lebih suka berkelompok mendekati toko-toko di daerah pertokoan pada sub-urban meskipun mendekati saingan-saingannya.

Faktor yang mendorong desentralisasi, yaitu :

- Kongnesti lalulintas sebagai suatu fungsi kepadatan yang memerlukan waktu perjalanan di daerah pusat kota.
- Adanya kecenderungan yang semakin meningkat bahwa perumahan dan permukiman terkonsentrasi pada daerah sub-urban. Desentralisasi tersebut dimaksudkan untuk memperbaiki potensi pasar di luar pusat kota.

Dengan demikian lokasi penentuan kegiatan di daerah perkotaan, setidaknya memperhatikan faktor-faktor yang menjadi pertimbangan dari lokasi tersebut, dimana salah satu faktor tersebut meliputi tingkat kemudahan atau keterjangkauan, faktor lingkungan dan pengaruh terhadap daerah sekitarnya.

D. Penentuan Kebutuhan Sarana Sosial Ekonomi di Kawasan Permukiman

Penentuan lokasi serta kebutuhan sarana disini dimaksudkan bahwa dalam melihat tingkat ketersediaan sarana dapat menunjang kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat dengan skala pelayanan yang mempunyai akses secara menyeluruh (*komperhensif*) untuk suatu lingkungan. Disamping itu agar keberadaan fungsi bukan sesuatu yang mubazir dalam skala prioritas kebutuhan atau menimbulkan kesenjangan sosial dalam masyarakat.

Dalam kegiatan sosial dan kegiatan ekonomi terdapat suatu istilah, yaitu ambang (*theshold*), yang berarti jumlah minimal penduduk untuk menunjang supaya suatu fungsi tertentu dapat berjalan lancar. Misalnya suatu macam prasarana yang lebih tinggi fungsinya, atau yang diperlukan oleh jumlah penduduk yang besar jumlahnya (pasar, sekolah menengah dan sebagainya), harus terletak di wilayah yang jangkauan

pelayanannya yang lebih luas, yaitu: bukan di desa tetapi di kecamatan. Jayadinata (1999:34).

Penyelenggaraan sarana sosial dan umum dimaksudkan guna memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kualitas kehidupan yang layak. Sarana sosial dan umum ini terdiri dari bangunan-bangunan dan lapangan terbuka yang dibutuhkan masyarakat, yang meliputi antara lain: sarana pendidikan, kesehatan, perbelanjaan-niaga, pemerintahan-pelayanan umum, peribadatan, rekreasi-kebudayaan, olahraga dan lapangan terbuka.

Dari penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa dalam penentuan kebutuhan sarana di kawasan pemukiman, diharapkan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat yang ada di kawasan tersebut, baik itu kebutuhan sosial maupun kebutuhan ekonomi dengan tingkat pelayanan mudah dijangkau oleh masyarakat.

E. Standar Perencanaan Sarana Sosial Ekonomi Berdasarkan Petunjuk Perencanaan Kawasan Perumahan Kota Departemen Pekerjaan Umum Tahun 1992

1. Sarana Pendidikan

Dalam upaya memberikan pelayanan kepada masyarakat, khususnya dalam kaitan dengan peningkatan sumber daya kualitas manusia, maka dibutuhkan jenis sarana pendidikan. Hal ini dapat diselenggarakan sesuai dengan besarnya kelompok komunitas dalam masyarakat. Dalam merencanakan fasilitas ini, titik tolaknya bermula dari

tujuan pendidikan yang ingin dicapai. Sehubungan dengan ini, maka ruang belajar diciptakan sedemikian rupa sehingga memungkinkan pihak siswa dapat mengembangkan daya citra, pengetahuan dan keterampilan serta sikap secara memadai. Dengan dasar ini dapat ditentukan perencanaan awal mengenai jumlah siswa yang memerlukan pelayanan sarana ini dan berapa daya tampung yang efektif dan efisien.

Fasilitas pendidikan yang mungkin dapat terluput adalah mulai dari tingkatan taman kanak-kanak (TK) hingga sekolah lanjutan. Fasilitas TK paling tidak dapat dibangun 3 ruang kelas berdasarkan standar, masing-masing dapat menampung sekitar 30-40 murid tiap kelas. Lokasinya dapat dipilih disekitar kelompok penduduk yang dekat dengan taman atau tempat bermain anak-anak, puskesmas dan warung, sehingga dapat terbentuk suatu unit kesatuan aktivitas antara anak, sekolah dan lingkungannya. Pada umumnya, untuk sekolah TK pihak swasta yang senantiasa mengambil inisiatif.

Bagi lingkungan permukiman yang mempunyai jumlah penduduk sekitar 1.600 jiwa selain sarana TK, juga dibutuhkan sarana untuk sekolah dasar. Sarana ini diperuntukkan bagi anak-anak usia sekolah 6 - 12 tahun, jumlah ruang minimum yang dibutuhkan adalah 6 ruang. Radius pencapaian sekitar 100 meter dari daerah yang dilayaninya, dengan letak yang masih di tengah-tengah kelompok penduduk, sedapat mungkin lokasinya tidak ada penyeberangan jalan penghubung atau jalan poros lingkungan.

Bagi lingkungan pemukiman baru wilayah desakota yang mempunyai jumlah penduduk sekitar 4.800 jiwa, diperlukan pula sekolah tingkat lanjutan, yaitu pertama dan atas. Untuk masing-masing tingkat dibutuhkan 6 ruang kelas dan beberapa ruang tambahan. Jarak jangkauan minimum ke lokasi antara 500 hingga 1000 meter, hal ini disesuaikan dengan kemampuan tingkat jangkauan seseorang, sehingga diharapkan seorang anak tidak terlalu lelah pada saat sampai di sekolahnya. Lokasinya tidak selalu harus di pusat lingkungan. Kedua sekolah lanjutan ini dapat disatukan letaknya, jika memungkinkan, guna penghematan "ruang". Kalau ditinjau dari segi efektivitas dan efisiensi maka selain penggabungan dalam pemanfaatan sekolah-sekolah tersebut juga dapat dipakai pagi dan sore hari.

Pada umumnya berbagai lokasi pemukiman baru agak terlambat dalam penyediaan fasilitas pendidikan semacam itu. Namun, dilihat dari ketersediaan lahan, tampaknya penyediaan ruang bagi pemebangunan sarana sekolah telah disiapkan. Hal ini mungkin terkait pula dengan kesempatan yang diberikan oleh administrasi sektoral, sebagai contoh: kaitan perizinan dengan Depdikbud, dan lain-lain, dan juga kebutuhan dari lingkungan setempat terhadap pembangunan sarana tersebut, karena tidak sedikit para penghuni yang cenderung menyekolahkan putra-putrinya di sekolah-sekolah yang terpendang, walaupun jauh letaknya dari tempat tersebut. Jadi pembangunan di bidang ini pun tergantung pula dari keinginan masyarakat setempat. Pada beberapa lokasi kebutuhan sekolah

dasar hingga sekolah menengah umum dikaitkan dengan program pemerintah.

Tabel 1. Standar Kebutuhan Sarana Pendidikan Berdasarkan Penduduk Pendukung

No	Jenis	Penduduk pendukung	Luas lahan	Radius
1	Taman kanak-Kanak (2 Kelas @ 35-40 Murid)	1000	1200 M ²	500 M
2	Sekolah Dasar (6 Kelas @ 40 Murid)	1.600	3600 M ²	1000 M
3	SLTP (6 Kelas @30 murid)	4800	2700 M ²	1000 M
4	SLTA (6 Kelas @ 30 Murid)	1 SLP	6000 M ²	1000 M

Sumber : Standar Dept. PU Tahun 1987.

2. Sarana Kesehatan

Sarana kesehatan untuk daerah pemukiman dapat berupa puskesmas pembantu, puskesmas, Apotek, rumah bersalin dan tempat praktek dokter. Kebutuhan sarana-sarana ini disesuaikan dengan kondisi

jumlah penduduk daerah setempat. Jika suatu daerah telah mencapai jumlah penduduk sekitar 6.000 jiwa, maka dibutuhkan sarana kesehatan semacam puskesmas pembantu. Jika jumlah penduduk sekitar 30.000 jiwa, maka dibutuhkan puskesmas. Sebuah puskesmas membawahi 5 puskesmas pembantu. Sarana rumah bersalin dan apotik dibutuhkan di daerah yang berpenduduk sekitar 10.000 orang.

Penyelenggaraan tempat praktek dokter sifatnya dapat berdasarkan atas inisiatif pribadi. Tempat tersebut dapat bersatu dengan rumah pribadi dan dapat pula terpisah. Para dokter umumnya memiliki status sosial yang relatif terpandang, sehingga sering dijumpai mereka tinggal di daerah yang baik, tetapi bukan tidak mungkin mereka berpraktek di daerah perumahan sederhana. Lokasi puskesmas pada umumnya di lokasi perumahan rakyat, sedangkan kompleks-kompleks elite, seperti di Pondok indah dan Bintaro, berdiri klinik-klinik swasta.

Tabel 2. Standar Kebutuhan Sarana Kesehatan Berdasarkan Penduduk Pendukung

N o	Jenis	Penduduk pendukung	Luas lahan	Radiu s
1	Balai Pengobata	3.000	300 M ²	1000 M
2	BKIA dan Rumah Bersalin	10.000	1.600 M ²	2000 M
3	Puskesmas	30.000	1.200 M ²	2000 M
4	Rumah Sakit Wilayah	240.000	8.64 Ha	--
5	Tempat Praktek Dokter	5.000	Bersat u dgn rumah	1500 M
6	Apotik	10.000	350 M ²	--

Sumber : Standar Dept. PU Tahun 1987.

3. Sarana Perdagangan

Ada beberapa macam sarana perdagangan, antara lain: pertokoan, pusat perbelanjaan lingkungan dan pusat perbelanjaan dan niaga yang berskala kecamatan. Bagi suatu lingkungan yang berpenduduk 2.500 jiwa diperlukan penyelenggaraan sarana perbelanjaan dan pertokoan sebagai tempat perbelanjaan kebutuhan sehari-hari. Sering juga dijumpai warung atau toko kecil di daerah tersebut, yang bersifat informal; artinya toko tersebut terdapat disuatu rumah huni yang bukan ruko. Walaupun toko tersebut kecil, tetapi karena dapat mencukupi kebutuhan masyarakat sehari-hari daerah setempat, maka keberadaannya tetap dihargai dan diperlukan oleh masyarakat. Selain itu, bisa juga terjadi rumah huni yang merangkap fungsi sebagai rumah makan, artinya sebagian dari bangunan rumahnya digunakan sebagai jasa usaha makanan. Keadaan ini banyak dijumpai di daerah perumahan semi dan nonelite. Dengan perkataan lain, pada pemukiman baru yang nonelite terjadi kecenderungan perkembangannya sektor informal yang seringkali mengganggu aspek estetika daerah setempat.

Bagi suatu lingkungan pemukiman yang mempunyai penduduk pendukung sampai dengan 30.000 orang disediakan sarana perbelanjaan lingkungan. Sifatnya lebih lengkap daripada pertokoan, jadi di samping pertokoan juga terdapat pasar, bengkel-bengkel reparasi kecil. Di beberapa lokasi perumahan kelompok menengah dijumpai pasar swalayan mini yang didirikan oleh swasta.

Selain itu, bagi lingkungan yang berpenduduk sekitar 120.000 orang dibutuhkan fasilitas pertokoan yang lebih besar, yaitu pusat perbelanjaan dan niaga berskala kecamatan. Jenis sarana ini tidak saja melayani keperluan sehari-hari tetapi juga dilengkapi oleh sarana niaga yang lebih luas, seperti: bank, industri berunit produksi dan tempat hiburan. Pasar-pasar swalayan besar seperti yang sedang menjamur merupakan bagian dari penyediaan sarana perbelanjaan dan niaga. Letaknya di sekitar pengkalan transpor umum.

Tabel 3. Standar Kebutuhan Sarana Perdagangan Berdasarkan Penduduk Pendukung

No	Jenis	Penduduk pendukung	Luas Lahan	Radius
1	Warung	250	100 M ²	500 m
2	Pertokoan	2.500	1200 M ²	1000 m
3	Pasar	30.000	13.500 M ²	1000 m
4	Pusat perbelajaan	120.000	36.000 M ²	--

Sumber : Standar Dept. PU Tahun 1987.

4. Sarana Peribadatan

Sarana peribadatan merupakan sarana kehidupan guna mengisi kebutuhan rohani. Penyelenggaraan tempat peribadatan ditentukan dengan keputusan masyarakat yang bersangkutan. Oleh karena suatu lingkungan perumahan baru kadangkala masyarakatnya mempunyai agama yang berbeda-beda, maka kepastian tentang jenis dan jumlah sarana peribadatan yang akan dibangun baru dapat ditentukan setelah

lingkungan perumahan dihuni selama beberapa waktu terlebih dahulu. Jadi pendekatan perencanaan yang dilakukan adalah berdasarkan perkiraan populasi dan jenis agama serta kepercayaan, kemudian direncanakan lokasi tanah dan lokasi bangunan peribadatan secara terencana dan hikmah keagamaan. Pada umumnya tempat peribadatan ini dibangun atas inisiatif penghuni setempat yang dibantu oleh developer, khususnya dalam penyediaan lahan.

5. Sarana Pemerintahan (Perkantoran)

Dalam rangka usaha memberikan pelayanan kepada masyarakat yang bersifat umum, maka dibutuhkan fasilitas pemerintahan dan pelayanan umum. Dasar pendekatannya adalah untuk melayani setiap unit administrasi pemerintahan, baik informal (RT, RW) maupun formal (kelurahan, kecamatan) sesuai dengan tingkatannya. Secara umum terdapat 3 (tiga) tingkatan: tingkat RW, kelurahan dan kecamatan. Tingkat RW meliputi sekitar 500 warga dan menyediakan antara lain: pos hansip, balai pertemuan, telepon umum, parkir umum, dan kakus umum. Tingkat kelurahan meliputi sekitar 6.000 orang, disertai penyediaan yang lebih lengkap dari tingkat pertama; fasilitas tambahannya antara lain: kantor kelurahan, pos polisi, kantor pos pembantu dan pos pemadam kebakaran, tingkat kecamatan meliputi sekitar 24.000 orang dan disertai tambahan fasilitas: kantor kecamatan, kantor telepon cabang dan gardu listrik beberapa perangkat ini tampaknya menambah beban masyarakat (pemukiman) seperti hansip, pos-pos keamanan dan sebagainya.

6. Sarana Olahraga/Open Space dan Rekreasi

Sarana umum lainnya yaitu sarana rekreasi dan budaya, disediakan kepada masyarakat, sesuai dengan kondisi dan situasi pemukiman masyarakat yang dilayaninya. Dapat dibedakan ke dalam 2 (dua) kelompok. Kelompok pertama meliputi 6.000 keluarga, setingkat dengan kelurahan, perlu disediakan sebuah gedung serbaguna, sedangkan kelompok kedua meliputi 24.000 keluarga, setingkat dengan kecamatan, dan perlu disediakan sebuah fasilitas gelanggang remaja. Hal ini sangat langka ditemui pada lokasi-lokasi untuk kelompok menengah.

Sehubungan dengan kesegaran jasmani masyarakat di suatu daerah pemukiman, maka dibutuhkan pelayanan olah raga dan lapangan. Sarana ini fungsinya selain sebagai kesegaran lingkungan juga dapat berfungsi sebagai taman dan tempat bermain anak-anak. Secara umum, dapat dibedakan menjadi empat kelompok. Kelompok pertama meliputi sekitar 250 jiwa, setingkat dengan RT. Sebagai lingkungan kecil perlu disediakan taman atau tempat bermain anak-anak. Kelompok kedua meliputi sekitar 500 keluarga, setingkat RW. Pada lingkungan kelompok ini perlu disediakan lapangan terbuka, yang dapat digunakan sebagai tempat olah raga bulutangkis, volley dan lain-lain. Kelompok ketiga meliputi sekitar 6.000 keluarga, setingkat kelurahan. Penyediaan sarana ini dapat digunakan untuk aktivitas pertandingan olah raga, apel, dan lain-lain. Kelompok keempat meliputi sekitar 24.000 keluarga, setingkat kecamatan. Penyediaan sarana terbuka merupakan suatu kesatuan antara taman,

tempat bermain dan lapangan olah raga, yang mengelompok dengan lingkungan sekolah. Pada lokasi kelompok menengah dan bawah, kegiatan ini pun tergantung pada inisiatif penghuni untuk memanfaatkan lahan kosong di sekitar kompleks.

Di beberapa daerah, penyediaan sarana ini telah ada dan cukup memadai. Masyarakat setempat menggunakan sarana ini secara teratur, umumnya setiap sore hari, di mana lapangan tenis yang tersedia selalu padat digunakan. Taman-taman kecil di sekitar pemukiman juga dapat dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat setempat, terutama oleh anak-anak, untuk bermain. Menurut Koestoer Hendro Raldi. (1997:136).

Jadi jelas secara keseluruhan bahwa penyelenggaraan jenis, macam dan besaran sarana-sarana ini dapat disesuaikan dengan kondisi daerah setempat, terutama terhadap jumlah penduduk lokal. Sarana sosial yang ada diharapkan dapat mengantar pada pembauran, artinya bukan penduduk daerah perumahan setempat saja yang dapat menikmati sarana tersebut, melainkan juga penduduk daerah sekitar, termasuk juga penduduk daerah belakang. Dengan demikian, penyediaan ini dapat digunakan oleh beberapa lingkungan perumahan secara bersama. Di beberapa lokasi masih terlihat bahwa pembangunan dan pengembangan utilitas umum terjadi kesenjangan, sedangkan dipihak lain para penghuni kompleks harus bersedia membayar biaya-biaya sosial tambahan.

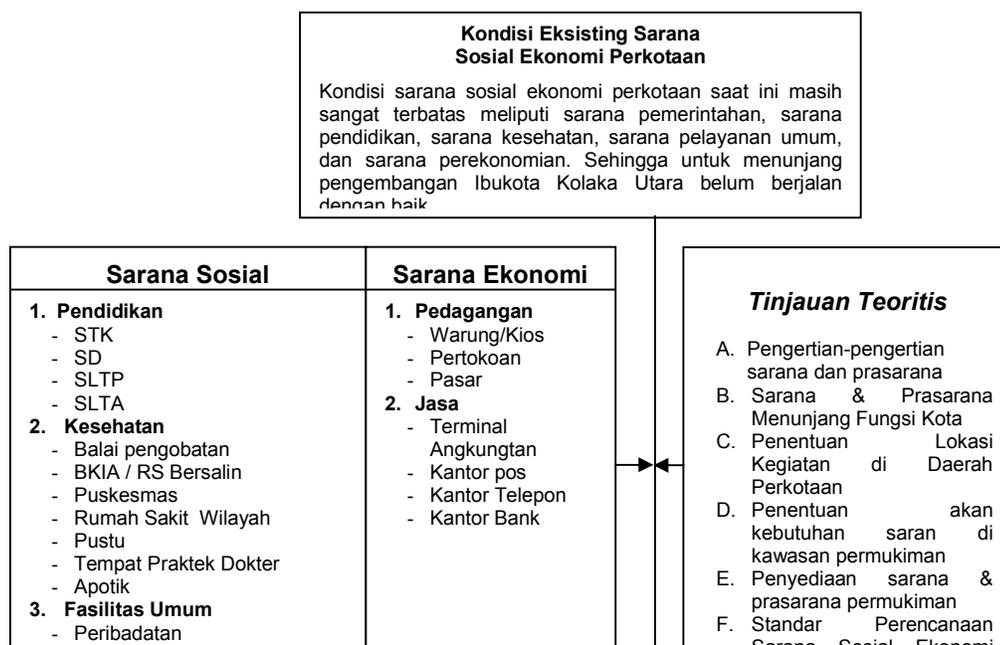
F. Penelitian Yang Terkait

Berdasarkan penelitian yang terkait sebelumnya, khususnya mengenai sarana sosial ekonomi perkotaan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Andi Ambaru Keteng (2003) dalam penelitiannya yang berjudul Ketersediaan Sarana Pendidikan Dasar Terhadap Kebutuhan Anak Usia Sekolah Di Kabupaten Wajo. Penelitian tersebut bertujuan untuk mengidentifikasi ketersediaan sarana pendidikan dasar berdasarkan kebutuhan anak usia sekolah dan mengidentifikasi penyebaran sarana pendidikan dasar terhadap kebutuhan anak usia sekolah di Kabupaten Wajo sebagai berikut :
 - a. Berdasarkan hasil perhitungan indikator pengembangan sekolah, jumlah sarana pendidikan SD yang ada saat ini dengan yang dibutuhkan telah mencukupi dan telah melebihi dari jumlah yang dibutuhkan dan untuk sarana Pendidikan SLTP jumlah sekolah yang ada masih perlu penambahan.
 - b. Penyebaran SD dan SLTP secara linear mengikuti pola jalan sehingga kapasitas SD yang tersedia lebih besar dari pada jumlah kebutuhan penduduk. Secara umum radius pelayanan SLTP telah mencakup wilayah Kabupaten Wajo.
2. Mansur Gessa (2004) dalam penelitiannya yang berjudul Ketersediaan Prasarana Lingkungan Permukiman Kumuh dan Dampak Sosial Ekonominya di Kelurahan Buloa dan Tello Kota Makassar. Penelitian

ini bertujuan untuk mengidentifikasi ketersediaan prasarana lingkungan Permukiman yang terdapat pada Kelurahan Buloa dan Tello Kota Makassar sebagai berikut:

- a. Bahwa ketersediaan prasarana lingkungan setelah dibangun beberapa jenis prasarana melalui proyek peningkatan kualitas lingkungan (PKL), ternyata masih tergolong rendah dan ketersediaannya masih belum memberikan tingkat pelayanan yang optimal.
- b. Bahwa perubahan perilaku masyarakat sebelum dan sesudah terlaksananya program penataan lingkungan permukiman di Kelurahan Buloa tidak menunjukkan perubahan yang signifikan, sehingga perubahan tersebut masih dalam kategori rendah baik dari segi sosial maupun ekonominya.
- c. Kondisi sosial ekonomi masyarakat di Kelurahan Buloa setelah dilakukan penataan prasarana lingkungan permukiman, tidak menunjukkan perbedaan yang berarti dengan kondisi di Kelurahan Tello.



Gambar 1 : Kerangka Pikir

BAB III Metodologi Penelitian, menjelaskan tentang Jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, populasi dan sampel, jenis dan

sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, variabel penelitian dan definisi operasional.

BAB IV Hasil dan Pembahasan, menjelaskan tentang analisis ketersediaan sarana sosial ekonomi perkotaan yang ada saat ini dalam mendukung pengembangan Ibukota Kabupaten Kolaka Utara. Mengkaji tantangan dan peluang pemerintah Kabupaten Kolaka Utara dalam mewujudkan alokasi sarana sosial ekonomi perkotaan.

BAB V Kesimpulan dan Saran, menjelaskan tentang simpulan dari hasil-hasil pembahasan pada bab-bab sebelumnya. Sedangkan saran-saran yang dikemukakan memuat saran-saran kepada pemerintah Kabupaten Kolaka Utara untuk menindaklanjutinya dalam bentuk penyediaan fasilitas sosial ekonomi secara menyeluruh dan merata sesuai dengan alokasi dan kebutuhan masyarakat kabupaten kolaka utara.

BAB IV

PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. GAMBARAN UMUM KOTA LASUSUA

1. Aspek Fisik Dasar Kecamatan Lasusua

a) Letak Geografis